

### **BAB III**

#### **POLA HEGEMONI KORPORATISME INTEREST GROUP BAKRIE**

Hegemoni bukan hanya milik Negara, tetapi bisa juga dilakukan oleh kelompok kepentingan. Pada BAB sebelumnya, hegemoni yang dijelaskan oleh Gramsci telah menyusuri hubungan Negara dengan dominasi kelompok kepentingan yang menjadi karakteristik hegemoni, termasuk dalam menyusun suatu kebijakan. Dalam kasus lapindo, Negara yang kemudian diintervensi oleh group Bakrie telah membawa kasus ini terkatung-katung selama 4 tahun. Janji Pihak PT. Minarak Lapindo untuk mengganti rugi korban lapindo masih belum terealisasi sepenuhnya.

##### **A. Lobby Jalur Hukum**

Hegemoni yang dilancarkan oleh group Bakrie bukan hanya dalam menguasai perekonomian tetapi lebih dari itu juga dengan menyebarluaskan ideologi bencana alam pada kasus semburan Lumpur Lapindo. Sudah 4 tahun sejak 26 Mei 2006, namun kasus Lapindo belum menemukan titik cerahnya. Sampai sekarang, lumpur lapindo masih aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap hari. Hal ini telah mengakibatkan kelumpuhan bagi 19 desa dari 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, dan Tanggul Angin: 14.000 keluarga kehilangan kehidupan normal mereka, 33 sekolah tenggelam dan enam pesantren tutup. Korban meninggal akibat ledakan gas pertamina sebanyak 15 orang.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup><http://edukasi.kompasiana.com/2010/07/30/bakrie-award-2010-ditolak-dan-peminatannya-12>

Putusan hukum yang dijatuhkan untuk kasus semburan lumpur lapindo pun sangat menguntungkan pihak Bakrie. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya pernah mengajukan gugatan kepada PT, Minarak Lapindo serta pemerintah. Gugatan ini kemudian ditolak Pengadilan Negeri Jakarta dengan alasan bahwa semburan Lapindo terjadi karena bencana alam. Begitu juga dengan gugatan dari YLBHI yang kandas di tengah jalan. Pada awalnya, hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa kesalahan ada pada pihak Lapindo, namun keputusan tersebut dianulir oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung.

Keganjilan hukum ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Surat penghentian penyelidikan (SP3) pada masa Kapolda Anton Bahrul Alam, padahal pada masa Kapolda sebelumnya yaitu Herman S. Sumawireja menyatakan Lapindo adalah pihak yang bersalah dengan menetapkan 13 tersangka. Subagyo, advokat yang sekaligus Tim Investigasi Komnas HAM dalam kasus Lapindo bahkan menyatakan bahwa di-SP3-kannya kasus Lapindo merupakan jual beli hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan cara menekan kejaksaan. Dalam kasus ini, pihak kejaksaan dikontrol agar tidak mempidanakan kasus Lapindo dilapangan dengan cara pengembalian berkas kasus kepada pihak Polda Jatim secara berulang-ulang dengan petunjuk yang berubah-ubah.<sup>67</sup>

Adanya penutupan kasus Lapindo pada tahun 2009 adalah implikasi dari ambiguitas keputusan presiden yang inkosisten dalam mengatasi kasus Lapindo. Dalam Kepres No 13 tahun 2006, disebutkan bahwasanya pemerintah



Aburizal Bakrie bisa dimaklumi jika melihat keputusan hukum Lapindo yang banyak menguntungkan pihak Abu Rizal Bakrie.

Kasus Lapindo ini mencuatkan banyak asumsi publik mengenai kelumpuhan hukum yang ditanggung oleh group Bakrie. Sebenarnya untuk membuktikan apakah Lapindo murni bencana alam atau murni kesalahan Lapindo, Sallahuddin Wahid meninjau dari 3 aspek yaitu keteknikan, hukum dan politik:

Dari aspek ketekhnisan, sebagian besar insinyur ketekhnikan menyatakan bahwa kasus bocornya Lapindo adalah teknis di lapangan. Fakta ini didukung oleh insinyur pengeboran internasional di Capetown pada tahun 2008 yang lalu. Para geolog dunia dalam pertemuan American Association of Petroleum Geologi ini memasukkan tema khusus kejadian semburan lapindo di Indonesia. Dari 74 peserta; 42 pakar menyatakan bencana Lapindo akibat kelalaian dalam pengeboran. Sedangkan 16 ilmuwan belum memberikan pendapat. Adapun 13 ilmuwan lainnya menyatakan penyebabnya adalah campuran antara pengeboran dan gempa bumi. Ditambah lagi dengan data yang diaudit BPK berupa dokumen rahasia Medco yang bocor ke publik. Dokumen kepemilikan mitra lapindo dalam eksplorasi blok Brantas ini mengungkapkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah kesalahan terkait aktifitas pemboran Sidoarjo.<sup>72</sup> Berbeda dengan ahli geologi di Indonesia yang malah menyatakan bahwa peristiwa ini adalah dampak dari gempa bumi di kawasan Yogyakarta. Dalam menganalisa kasus ketekhnisan

---

<sup>72</sup> = ...

ini; ada satu fakta bahwa belum pernah ada pertemuan ilmiah antara kedua kelompok tersebut untuk beradu argumentasi.<sup>73</sup>

## **B. Pembentukan Sekretariat Gabungan**

Kenyataan bahwa kasus Lapindo menjadi bias dimata hukum sehingga mengorbankan ribuan nyawa rakyat Sidoarjo adalah dampak dari hegemoni yang dilancarkan oleh pemilik pemilik group Bakrie, Aburizal Bakrie dengan memperjual-belikan hukum. Tentu saja hal tersebut tidak akan mampu dilakukan sembarang orang yang tidak berpengaruh di Negara ini. Modal kapital yang besar bukan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan kepemimpinan kultural seperti yang dikatakan Gramsci. Perlu metode lain yang lebih strategis sehingga kepentingan yang dikehendaki bisa digoal-kan. Termasuk mempengaruhi *police maker*. Ada beberapa pola yang digunakan Aburizal Bakrie dalam menyebarkan ideologinya; terutama menjadikan kasus lapindo sebagai bencana alam; sehingga sebagian anggaran APBN banyak disedot untuk mengganti rugi korban lumpur Lapindo.

Aburizal Bakrie sebagai komisaris utama di Bakrie group adalah seorang pengusaha kaya yang dinobatkan menjadi orang terkaya se-ASIA versi majalah Forbes Asia pada tahun 2007. Dengan perjalanan kariernya yang pernah menjabat sebagai Menteri perekonomian rakyat di Kabinet Indonesia bersatu, Aburizal Bakrie sekarang adalah Ketua Umum partai Golkar yang merangkap sebagai ketua umum Sekretariat gabungan. Kabar terbaru dari politisi ini adalah niatannya untuk maju ke Pilpres 2014. Cita-cita Aburizal Bakrie untuk maju ke arena

<sup>73</sup> Salahudin Wahid "Data lumpur Lapindo" dalam opini KOMPAS, 12 Desember 2010

pemilihan Presiden tahun 2014 sudah dibarengi dari peneitraan diri, termasuk bagaimana membersihkan namanya dari kasus Lapindo.

Posisi Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Ketua Sekretariat Gabungan menjadi strategis dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudiyono saat ini. Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah koalisi sejumlah parpol pendukung SBY yang dibentuk di Puri Cikeas, Bogor pada Kamis malam tanggal 6 Mei 2010 di bawah pimpinan langsung Presiden SBY. Pada kesempatan itu, terpilih ketua umum partai Golkar, Aburizal Bakrie sebagai ketua harian, dan Syarif Hasan sebagai sekretaris. Pembentukan Setgab ini dimaksudkan Aburizal Bakrie sebagai wadah untuk membicarakan masalah-masalah krusial seperti penyusunan UU APBNP dan kepala Kapolri.

Keberadaan Setgab ini tidak lepas dari isu politik sebelumnya yang mengakibatkan Sri Mulyani lengser akibat kasus Century. Bahkan keberadaan Aburizal Bakrie sebagai ketua Setgab telah berhasil membuat kasus Century tenggelam. Kritikan pembentuk Setgab datang dari salah satu anggota partai PDIP; Ganjar Pranowo yang menilai bahwa Setgab adalah praktek dari politik transaksional elite dan keterlisasi yang tidak memperhatikan rakyat. Menurutnya, pembentukan setgab akan menimbulkan keterlisasi politik di mana pemerintah (penguasa) akan mengamankan segala kebijakan-kebijakannya, terutama Aburizal Bakrie yang menjadi Ketua Umum koalisi ini. Masih dari fraksi yang sama (PDIP), Arief Budimanta menilai bahwa Setgab adalah hegemoni baru kroni kapitalisme di era reformasi yang sebelumnya pernah terjadi di era Soeharto.

Hegemoni Golkar pada zaman Orde Baru terlahir kembali melalui wajah setgab di

mana dikotomi kekuatan oposan dan koalisi merepresentasikan kekuatan kutub pro rakyat ataupun pro penguasa. Akibatnya, akan ada banyak produk kebijakan yang menguntungkan para penguasa.<sup>74</sup>

Seorang peneliti hukum *corruption watch*, Donald Fariz menyebutkan bahwa dengan dibentuknya sekretariat gabungan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, telah memberikan banyak porsi kekuasaan seperti penyandraan hukum dalam jangka waktu panjang.<sup>75</sup> Setgab adalah pemecah ombak kelompok oposan yang mengancam keberadaan Susilo Bambang Yudiyono. Tawar menawar kekuasaan (*political bargaining*) menjadikan Golkar di bawah Pimpinan Aburizal Bakrie memutar haluan menjadi partai koalisi pemerintah, sehingga sekarang berada satu gerbong kereta dengan pemerintah.

Jabatan sebagai ketua sekretariat gabungan menurut pengamat hukum ini telah memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar, sehingga mampu merapikan barisan koalisi di parlemen. Aburizal Bakrie adalah the *invisible hand* (tangan tak tampak) untuk menyeiramakan suara parlemen yang terdengar 'sumbang' terhadap pemerintah. Politik kartel semacam ini merupakan sistem yang terbentuk dari koalisi elit politik. Sistem ini digunakan untuk meminimalkan kerugian pihak yang kalah, baik dalam pemilu atau dalam koalisi. Sistem Kartel ini lebih mengutamakan mekanisme perangkulan dari elite yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda. Dalam sistem kartel, dorongan berpartisipasi kabinet dan

---

<sup>74</sup> Muchtar Effendi Harahap; "Menyoal Setgab parpol Koalisi dan oposisi politik" [http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2010\\_06\\_01\\_archive.html](http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2010_06_01_archive.html) di akses pada tanggal 30 mei 2010

<sup>75</sup> Donald Fariz "Tanggapan Kadal Century", dalam OPINI KOMPAR, 31 Mei 2010

struktur kepemimpinan di Komisi misal karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama.

Sependapat dengan Donal fariz, posisi Aburizal Bakrie sebagai ketua Setgab menurut Salahudin Wahid sangat startegis dalam menanggulangi kasus lapindo yang menjeratnya. Dengan posisi tawarnya, Aburizal Bakrie mampu menyandera penegakan hukum di negara ini. Salah satunya adalah dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) perihal peristiwa semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Seperti dijelaskan di atas, selain dengan mendekati para ilmuwan geolog dengan mewacanakan semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam, Aburizal Bakrie juga berhasil mewacanakan "kemurahan hati mereka" dalam membantu korban dengan mengeluarkan dana sebanyak 5 Trilyun.

Selain memutuskan status Lapindo sebagai bencana alam, anggota dewan juga lebih memilih menjadikan kawasan Sidorajo sebagai kawasan wisata Geologi daripada menanggulangnya. Menurut anggota dewan, wakil komisi V DPR, Yoseph Umar Hadi kasus Lapindo lebih baik dibiarkan karena akan menguras banyak biaya.<sup>76</sup> Pemerintah telah menyiapkan dana setidaknya 273 Milyar untuk merelaisasikan pembangunan objek wisata Geologi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini diakui oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menyatakan proyek ini akan dimulai pada tahun 2011.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> <http://surabaya.detik.com/read/2010/05/11/193020/1355546/475/anggota-dpr-ri-minta-semburan-lumpur-lapindo-dibiarkan> di unduh tanggal 21 Agustus 2010

<sup>77</sup> Surabaya, Anantara Pos <http://www.antaraneews.com/berita/1275062877/pemerintah-siapkan-rp273-miliar-untuk-wisata-lapindo> di unduh pada tanggal 21 Agustus 2010

### **C. Pendekatan Struktur Keagamaan.**

Hegemoni dalam analisa Gramsci mengisyaratkan adanya kepemimpinan moral dan intelektual sebagai alat untuk menguasai, sebagai jalan untuk menginternaslisasikan nilai-nilai serta norma atas subordinasi kelompok tersebut. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang mencakup media massa, sekolah, gereja (lembaga keagamaan). Peran yang dipegang oleh apparatus tersebut sangat signifikan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat. Terlebih lagi jika menyangkut urusan agama, Gramsci menilai bahwasanya oraganisasi keagamaan memiliki otonomi yang besar dari Negara dalam banyak formasi sosial. Dalam hal ini; agama dikonsepsikan oleh Gramsci sebagai suatu sistem nilai moral; sistem kepercayaan maupun moral politik.<sup>78</sup>

Menurut Gramsci, agama dan akal sehat tidak dapat membentuk suatu tatanan intelektual; karenanya keduanya tidak dapat direduksi menjadi kesatuan koherensi bahkan dalam suatu kesadaran individual maupun kolektif, atau bahkan sebaliknya keduanya tidak dapat direduksi secara bebas-karena dapat dilakukan secara otoritarian; meksipun memang dalam batas-batas yang dilakukan pada masa lalu.

Selain pemerintah yang merespon bencana ini, kompleksitas yang diakibatkan oleh bencana Lumpur Sidoarjo juga melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok sosial masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Salah satu kelompok dari masyarakat yang keberadaannya diperlukan dalam penanganan dampak dari Sidoarjo adalah

---

<sup>78</sup> Robert Boccok.,op.cit., hal 124

komunitas keagamaan. Hal ini menjadi sangat signifikan mengingat masyarakat daerah Sidoarjo memiliki basis nilai keagamaan yang kuat. Berdasarkan catatan, tempat keagamaan yang menjadi koban sampai Mei 2007 mencapai 65 buah, sementara sekolah keagamaan (madrasah/pesantren) mencapai 28 buah dengan total santri sejumlah 2701 orang dan guru agama sebanyak 198 orang.<sup>79</sup> Keberadaan komunitas keagamaan yang besar secara kuantitas ini yang kemudian akan dibaca melalui perspektif Gramsci, melalui pola apa saja hegemoni disebar. Ada dua organisasi keagamaan yang akan dibaca, yaitu NU Porong dan Muhammadiyah Porong.

### **6.1 NU Porong**

NU porong adalah komunitas sosial keagamaan terbesar di Porong. Secara umum, NU di Porong memberikan dua respon yaitu berupa respon sosial dan respon keagamaan. Respon sosial dilakukan dengan mendirikan posko bantuan, misalnya posko pengungsian, namun posko ini menghentikan operasi sumbangannya sejak ada isu kucuran ganti rugi 20% korban Lumpur. Sedangkan respon keagamaan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan massal, seperti istighasah, pengajian ataupun dzikir bagi korban Lumpur.

Sejak isu ganti rugi terhadap korban bencana Lapindo bergulir, komunitas keagamaan NU tidak terlepas dari isu makelarisasi ganti rugi. Urusan makelarisasi ini sangat sensitif bagi korban bencana Lapindo karena bisa menimbulkan konflik kepentingan. Tokoh budayawan sekaligus agamawan, Emha

Ainun Najib-pun tidak terlepas dari tuduhan makelarisasi ini.<sup>80</sup> Isu makelarisasi ini menghinggapi beberapa oknum NU yang dianggap menggunakan nama NU untuk mendapatkan 'proyek' dari bencana Lapindo.

NU sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu bencana Lapindo. Pertama yang menganggap bencana ini sebagai takdir Allah SWT, yang kedua sebagai kesalahan manusia (*human error*), yang ketiga menganggap bencana ini sebagai kombinasi takdir dan kesalahan manusia. Ketiga pendapat ini memiliki kesamaan dalam memandang bencana ini berkaitan dengan faktor Tuhan, selain akibat kesalahan manusia.

Isu mengenai 'takdir' Tuhan ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi pihak Lapindo dalam mengatasi penanggulangan korban bencana, apalagi sejak diputuskan dalam Kepres no 14 tahun 2007. Status penamaan semburan Lumpur Lapindo sebagai bencana alam (takdir) disebar oleh tokoh agama sehingga akan menguntungkan pihak PT. Lapindo brantas.

## **C.2 Muhammadiyah Porong**

Seperti halnya NU, organisasi Muhammadiyah juga sangat responsif dalam menanggulangi semburan Lumpur Lapindo. Respon yang dilakukan hampir sama yaitu berupa respon sosial maupun respon keagamaan. Muhammadiyah Porong memberikan bantuan langsung dengan menyelenggarakan *event-event* pembagian bantuan tanpa membuat posko. Kegiatan keagamaan yang dibuat oleh Muhammadiyah Porong tidak seperti NU yang menyelenggarakan kegiatan

keagamaan yang bersifat massal. Muhammadiyah Porong hanya melakukan pendekatan personal kepada warga Muhammadiyah yang terkena musibah.

Pandangan teologis dari kalangan Muhammadiyah terhadap bencana Lapindo cenderung seragam. Mereka menganggap bahwa bencana lapindo diakibatkan oleh kesalahan manusia.

### **C.3 Analisa Komparatif Hegemoni diantara NU dan Muhammadiyah**

Bagi Gramsci, kelompok agama digolongkan ke dalam kelompok masyarakat sipil di mana terjadi perjuangan politik diantara sesama kelompok agama, pemilik modal, serikat dagang maupun partai politik. Menurutnya, kelompok keagamaan bisa menjadi kelas hegemoni karena lewat organisasi-keagamaan ini terjadi perjuangan politik dan ideologis.

Teori Gramsci ini bisa dilihat dari kelompok NU yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah Porong. Sebagian Kyai NU ini memiliki inisiatif membawa masalah Lumpur ini menjadi bencana nasional. Meskipun inisiatif ini tidak terlaksana, namun inisiatif tersebut menunjukkan pola fikir sebagian kyai NU yang lebih condong kepada tindakan kooperatif dengan pemerintah. Respon demikian dinilai Pengurus NU lebih startegis karena NU kehilangan banyak asset akibat bencana. Adalah satu kenyataan jika memang NU Porong jauh lebih banyak kehilangan asset daripada Muhammadiyah. Oleh karena itu, NU Porong berupaya mencari ganti rugi aset yang hilang tersebut berbekal sertifikat.

Pandangan teologis yang menilai bahwa bencana adalah takdir dan diakibatkan oleh faktor Tuhan, (*bencana lapindo sudah tertulis di zaman Azzali*)

banyak diadopsi oleh kalangan NU dan Muhammadiyah karena itu selaras dengan

ditawaran pun selaras dengan doktrin ajaran yaitu *mengimani dan kembali ke jalan Tuhan*. Pandangan deterministik ini lebih di dominasi oleh kalangan elit Kyai NU daripada Muhammadiyah dikarenakan NU lebih terpengaruh oleh kitab kuning klasik. Dengan mainstream berfikir seperti ini, dan respon keagamaan seperti Istighasah, dzikir bersama maka NU menjadi bagian dari kelompok penguasa yang telah mempraktikan dan menyebarkan hegemoni di kalangan masyarakat Sidoarjo jika dirunut dengan kacamata Gramsci.

Keterlibatan basis NU lainnya bisa dianalisa dari hal yang dilakukan Aburizal Bakrie adalah dengan melakukan melakukan safari ke sejumlah pesantren (ponpes). Pada tanggal 26 Agustus 2010, Aburizal Bakrie mendatangi Ponpes lirboyo. Pada kesempatan tersebut, Aburizal Bakrie di depan Pimpinan dan santre Lirboyo menjelaskan bahwasanya kejadian tragis yang menimpa warga Sidoarjo adalah murni bencana alam dan bukan kesalahan dari perusahaan. Selain itu, Aburizal Bakrie juga mengungkapkan, tak benar jika lapindo memberi kompensasi yang tak layak kepada korban. Menurutnya, lapindo sudah membeli tanah warga dengan harga dua puluh kali lipat dari nilai jual objek pajak (NJOP). Dengan persyaratan bahwa tanah tersebut haruslah yang benar-benar bersertifikat. Acara 'sowan' ini pun tidak berhenti di ponpes lirboyo saja tetapi dilanjutkan dengan mengunjungi lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII) di Burengan .<sup>81</sup>

#### **D. Pembungkaman Intelektual Organik; Bakrie Award**

Dalam pandangan Gramsci, kepemimpinan intelektual dan filosofis harus secara aktif diproduksi, karena hegemoni dapat dibentuk melalui beberapa

---

<sup>81</sup> Lihat Radar Yogya, edisi 27 Agustus 2010, "*Ical Klarifikasi Lapindo di Lirboyo*"

keadaan dalam masyarakat sipil bahkan jika bukan dalam konteks perekonomian: Gramsci bahkan membahas peran intelektualisme dalam masyarakat sipil. Setidaknya ada tema yang menjadi bahasan Gramsci terhadap intelektual. Pertama adalah perlunya menghapus perbedaan kerja manual dan kerja intelektual yang telah berlangsung di bawah kapitalisme dalam produksi, dalam masyarakat sipil dan aparatus Negara. Kedua adalah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang akan menjadi dasar analisa dari pemberian Bakrie award, terkait pemikiran Gramsci mengenai watak kekuasaan yang lahir dari akibat monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa.

Gramsci tidak mengembangkan teori intelektual yang komperensif tetapi dia melakukan sejumlah observasi terhadap mereka dalam masyarakat serta hubungannya dengan gerakan buruh dan partai revolusioner. Intelektual bagi Gramsci bukan dieirikan oleh aktifitas instrintik yang dimiliki oleh semua orang namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Definisi intelektual menurut Gramsci adalah semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Bagi Gramsci ada satu pandangan umum yang dia kritisi terhadap intelektual di mana menurutnya mereka bukan hanya pemikir, penulis, dan seniman tetapi organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik. Mereka tidak hanya berguna dalam masyarakat sipil dan Negara tetapi juga dalam alat produksi seperti ahli mesin, manajer, dan sebagainya.

Gramsci membagi intelektual menjadi dua jenis, yaitu intelektual organik dan intelektual tradisional. Menurut dia, intelektual organik adalah mereka yang



Para pemenang Bakrie Award ini diberi hadiah berupa piala, sertifikat dan uang senilai 250 juta. Meskipun begitu, dua nominator Bakrie Award 2005 yaitu Sitor simorang dan Daud Joesoef tidak menghadiri perhelatan yang diselenggarakan di balai Sarbini 5 Agustus kemarin.<sup>84</sup> Tokoh yang sebelumnya menolak Bakrie Award dengan jalan mengembalikan Bakrie Award adalah Gonawan Muhammad dan Frans Magnis Suseno.

Gonawan Muhammad mengakui telah mengembalikan Bakrie Award setelah selama empat bulan berkontemplasi. Goenawan Muhammad mengembalikan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta berikut bunganya sejak tahun 2004 dalam bentuk cek kepada pihak freedom insitute.<sup>85</sup> Pengembalian Bakrie Award oleh Goenawan Muhammad ini didasarkan atas kekecewaannya terhadap Aburizal Bakrie yang merupakan pendiri dan donatur utama Freedom Institue: Aburizal Bakrie dinilainya sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian lumpur Lapindo namun sikap yang ditunjukkan Ketua Umum partai beringin ini malah sebaliknya. Kekecewaan Goenawan Muhammad semakin bertambah saat Bakrie melakukan trik politik dalam kasus Century sehingga mampu melengserkan Menteri keuangan saat itu, Sri Mulyani. Berbekal dua alasan tersebut, akhirnya kolumnis majalah Tempo tersebut mengembalikan Bakrie Award.<sup>86</sup>

Seruan untuk mengembalikan Bakrie Award juga dilakkukan secara komunal oleh beberapa aktivis dan organisasi non-pemerintah. Mailing list yang

---

<sup>84</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/06/160322/88/14/Daoed-dan-Sitor-tak-Hadiri-Bakrie-Award-2010> di unduh tanggal 9 agustus 2010

<sup>85</sup> Kompas, 22 Juni 2010

<sup>86</sup> <http://www.tempoonline.com/2010/06/22/gonawan-muhammad-kembalikan-bakrie-award>

dikirim melalui jaringan dunia maya menyerukan pengembalian Bakrie Award kepada para pihak yang sebelumnya telah menerima Bakrie Awards. Miling ini dikirim melalui [bencana@googlegroups.com](mailto:bencana@googlegroups.com) ke milis bencana, milis elshinta, milis jurnalisme; milis lingkungan; dll. Dalam miling list ini diserukan kepada para penerima Bakrie award mengenai penderitaan yang diakibatkan oleh Aburizal Bakrie karena tidak bertanggung jawab penuh atas kejadian semburan lumpur di Sidoarjo:

#### **E. Pembentukan Opini Media**

Untuk menyebarkan suatu kebenaran ataupun berita terhadap individu lain seseorang membutuhkan media. Media ini tidak hanya berperan sebatas penyampaian fakta. Realitas media adalah serangkaian fakta yang dipilih, diseleksi dan dibingkai sedemikian rupa untuk menghadirkan suatu rangkaian imaji yang utuh; tentang suatu peristiwa pada saat yang bersamaan realitas media merupakan usaha yang menyampaikan salah satu versi kebenaran tentang peristiwa, yang karena keterbatasan ruang dan waktu dan juga kepentingan politik tertentu terpaksa mengabaikan versi kebenaran yang lain.<sup>87</sup>

Dalam level produksi berita seringkali dipusatkan pada proses pembentukan berita (newsroom). Newsroom bukan ruang hampa, netral, atau menyalurkan informasi apa adanya sesuai fakta lapangan. Proses pembentukan berita adalah proses yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese, seperti yang di kutip oleh Agus Sudibyo, mengidentifikasi lima

faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi.<sup>88</sup> Pertama, faktor individual. Kedua, level rutinitas media. Ketiga, level organisasi. Keempat, level ekstra media. Pada level keempat ini sedikit banyak mempengaruhi pemberitaan di media: Faktor ekstra level ini adalah:

- a. Sumber berita. Sumber berita dipandang bukanlah pihak yang netral dalam memberikan informasi yang apa adanya, ia juga memiliki kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan, seperti memenangkan opini publik atau memberi citra tertentu kepada khalayak sebagai pihak yang memiliki kepentingan maka tentu saja sumber berita memberlakukan politik pemberitaan:
- b. Sumber penghasilan media. Sumber penghasilan media ini bisa berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan atau pembeli media. Untuk dapat bertahan hidup kadangkala media berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Pihak pengiklan memiliki strategi untuk memaksakan kepentingannya kepada media, termasuk memaksa media untuk mengembargo berita buruk mengenai mereka.
- c. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Pemerintah dalam banyak hal memegang lesensi penerbitan, dan untuk tetap terbit maka media tersebut harus mengikuti batas-batas yang telah ditentukan.

- d. Level ideologi: Diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

### **1. Propaganda Surat Kabar**

Pada kasus Lapindo analisa wacana dilakukan terhadap teks media alternatif sebagai respon atas kasus Lapindo. Aburizal Bakrie adalah pengusaha yang kaya di mana dia mampu membeli sejumlah media untuk menyebarkan hegemoninya bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam bukan bencana akibat kesalahan teknis pengeboran. Bahkan Aburizal Bakrie melakukan rekayasa kuasa pada menamaan peristiwa ini. Beberapa surat kabar merujuk nama lokasi, seperti "Lumpur Porong" (Porong : adalah nama kecamatan ) atau Lumpur Sidoarjo (Sidoarjo adalah nama kabupaten). Beberapa media internasional seperti National Geographic atau Nature menggunakan istilah "Lumpur Sidoarjo" atau disingkat Lusi. Namun secara spontan beberapa pekerja media menggunakan istilah Lapindo dalam wacana sehari-hari meskipun tulisannya tidak menggunakan istilah ini.

Dilema penamaan media diatas atas peristiwa semburan lumpur ini ditemukan Suryandaru dalam riset yang dilakukan atas tiga media nasional yaitu Kompas, Media Indonesia dan Seputar Indonesia. Selain itu, dia juga menambahkan tiga media lokal yaitu Jawa Pos, Surya, dan Surabaya Pos. Menurut Suryandaru ada surat kabar yang secara konsisten menggunakan istilah

Sementara beberapa surat kabar lain memiliki kecenderungan yang inkonsisten dalam pemberian label pada peristiwa ini. Beberapa nama muncul dalam pemberitaan media dalam kelompok terakhir tadi mulai dari “Lumpur Lapindo”; “Lumpur Sidoarjo”; sampai hanya dengan menyebutnya Lumpur tanpa embel-embel apapun. Bagi Suryandaru nama “Lumpur Lapindo” berkonotasi menghakimi Lapindo Brantas sebagai pihak yang bertanggungjawab atas luapan lumpur. Sementara penamaan “Lumpur Porong” atau “Lumpur Sidoarjo” lebih berkonotasi netral tidak menuduh ataupun menyalahkan siapa yang menjadi penyebab semburan lumpur.<sup>89</sup>

Aburizal Bakrie adalah pengusaha yang memiliki banyak usaha; dengan modal yang dia miliki maka bukanlah suatu hal yang sulit untuk mengontrol opini publik lewat kontruksi realitas media massa. Lapindo bahkan menawari media massa di Surabaya untuk menerima satu Milyar rupiah untuk setiap pendekatan komersial yang mendukung kepentingan mereka.<sup>90</sup> Harian Surya adalah surat kabar lokal Surabaya yang mengambil tawaran iklan Lapindo. Lapindo membeli satu halaman penuh Harian Surya untuk advertorial selama satu bulan penuh. Meskipun Advertorial ini diterbitkan satu halaman penuh selama enam bulan berturut-turut, Harian Surya masih mengklaim independen terhadap pemberitaan mereka terkait Lapindo.

Selain Harian Surya, Bakrie group juga membeli saham Harian Surabaya Post, yang keberadaannya hampir saja kolaps. Dhimam Abroer yang merupakan

---

<sup>89</sup> Ibid halaman 4

<sup>90</sup> Hasil Penelitian: *Antara Nelayan dan Pengusaha* oleh Dhimam Abroer

pimpinan Redaksi Surya Post mengambil kebijakan redaksional dengan tidak memberitakan kasus semburan Lumpur lapindo. Pilihan ini dibuat Dhimam Abroer berdasarkan pertimbangan kondisi redaksi Surabaya Post yang sedang membutuhkan rehabilitasi finansial:

## **2. Propaganda TV**

Aburizal Bakrie merupakan pemilik 2 stasiun TV yaitu ANTV dan TV one. Pada sebuah wawancara yang disiarkan oleh ANTV tertanggal 5 April 2009; Aburizal Bakri mengakui bahwa Lapindo hanyalah salah satu perusahaan kecil dibanding oleh perusahaan lainnya, tapi lumpur Lapindo telah mengakibatkan masalah besar. Menurutnya; tidak ada ganti rugi; yang ada adalah transaksi jual beli antara penduduk Lapindo sebagai penjual dan pihak Lapindo sebagai pembeli sesuai dengan Perpres no 14 tahun 2007 pasal 15. Menurut Aburizal Bakrie, semburan Lumpur lapindo terjadi karena gempa bumi Yogyakarta sehingga Lapindo tidak harus bertanggung jawab. Bakrie menggunakan hasil sidang pengadilan negeri Jakarta tertanggal 22 Januari 2008 sebagai dasar argumennya. Oleh karena kejadian semburan alam merupakan bencana alam; maka PT: Lapindo Brantas menurutnya merupakan bagian sama dari korban.

Untuk membentuk asumsi publik bahwasanya kasus semburan lapindo adalah bencana alam; Aburizal Bakrie sering menayangkan running teks di tayangan berita yang di putar TV One. Salah satunya adalah tertanggal 1 Oktobet 2010. Pada running teks yang menyertai berita petang, disebutkan bahwasanya